

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal penghuninya, sarana pembinaan keluarga serta cerminan harkat dan martabat bagi penghuni yang tinggal di dalamnya. Pada dasarnya setiap manusia pasti berkeinginan memiliki rumah yang layak huni faktor kemiskinan menjadi hambatan bagi manusia untuk membangun bangunan selayaknya rumah Indonesia masih tinggal didalam rumah tidak layak huni. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia dan banyaknya jumlah rumah tidak layak huni, pemerintah memiliki salah satu program untuk memberantas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan membuat program Bedah Rumah.

RTLH dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu (1). Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI, (2). Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI, (3). Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI, (4). Kualitas konstruksi bangunan selain hal tersebut diatas minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6-7 skala richter), (5). Luas bangunan menggunakan standar luas per orang (9m²/orang) dalam pasal 22 ayat (3) UU 1 Tahun 2011.

Dari beberapa pernyataan bahwa RTLH menurut HRC Caritra merupakan rumah atau hunian yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi persyaratan; antara lain (1). Keselamatan dan Keamanan konstruksi bangunan, (2). Kecukupan minimum luas bangunan, (3). Keadilan sosial dan kesehatan penghuni

Pemilihan penerima bantuan bedah rumah diberikan kepada warga yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, namun pemilihan penerima bantuan ini masih sangat bersifat subjektif. Bukan hanya itu saja dalam sistem yang berjalan pemberian bantuan bedah rumah ini adalah minimnya jumlah bantuan dengan jumlah warga yang dianggap layak dan sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bercita-cita agar seluruh keluarga di Indonesia menempati tempat tinggal yang layak sehat aman dan legal, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang (sangat) miskin (MBR) tidak mampu menjangkau rumah atau kaveling yang legal, sehat, memenuhi

syarat. Selain harganya yang tinggi, stok-nya juga tidak tersedia untuk jenis yang sesuai dengan kemampuan MBR/miskin. Pemerintah mencoba menerapkan konsep Rumah Sangat Sederhana (RSS) tetapi harganya tetap tidak terjangkau oleh MBR, dan jumlah produksinya juga sangat terbatas. Sementara itu tanah perkotaan dan ruang-ruang kota yang sesuai planning/RTR habis dimiliki/dikuasai oleh masyarakat yang lebih mampu.

Pemerintah sebagai pembina, pengawas dan pengendali pembangunan perumahan selayaknya memahami fenomena ini sejak awal sehingga sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Aparat pemerintah yang berkaitan dengan perumahan masih banyak yang belum mengetahui akar masalah terjadinya perumahan tidak layak huni sehingga penyelesaiannya masih bersifat adhoc. Oleh sebab itu aparat pemerintah bidang perumahan harus diberi pengetahuan dan ketrampilan dalam menangani masalah perumahan tidak layak huni.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Dan Permukiman Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Padang Panjang sebanyak 442 unit. masih banyak terdapat rumah tidak layak di kota padang panjang. untuk itu Penelitian ini untuk mengetahui prioritas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan status kepemilikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penentuan prioritas rumah tidak layak huni berdasarkan status kepemilikan di Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Mengetahui Prioritas penanganan rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi Rumah Tidak layak Huni berdasarkan karakteristik
2. Menentukan prioritas rumah tidak layak huni di kota padang panjang
3. Teridentifikasi penanganan rumah tidak layak huni dengan status kepemilikan dalam penanganan rumah tidak layak huni.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam kajian ini meliputi :

Penelitian ini terfokus pada penentuan prioritas rumah tidak layak huni (RTLH) dan disandingkan dengan status kepemilikan rumah tidak layak huni (RTLH). Dan karakteristik rumah tidak layak huni di Kota Padang panjang.

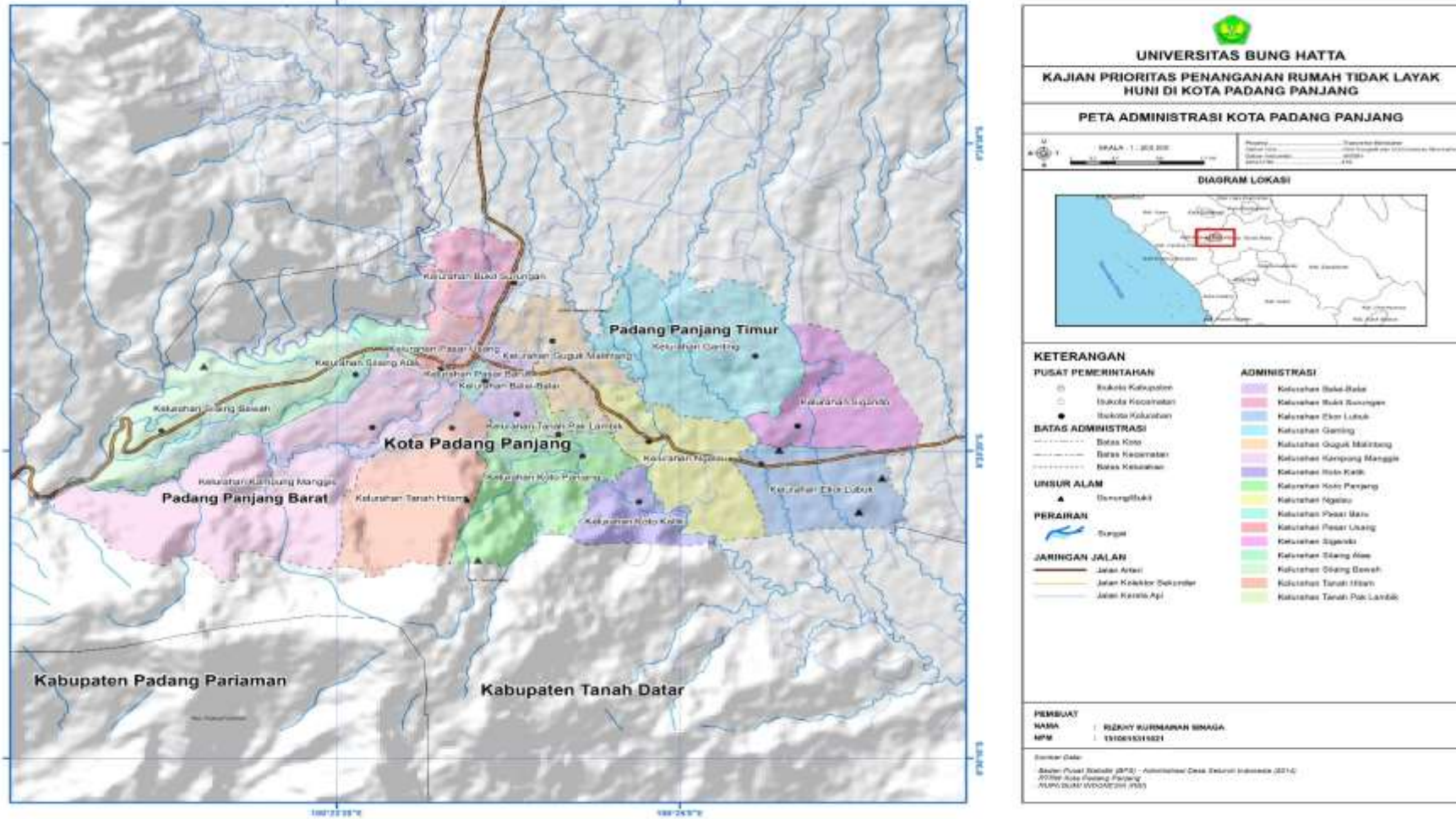
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Padang Panjang adalah salah satu kota dengan luas wilayah terkecil yang ada di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, dan juga dikenal sebagai Mesir van Andalas (Egypte van Andalas).[5] Sementara wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Padang Panjang sebanyak 59.998 jiwa,. Batas-batas administrasi wilayah Kota Padang Panjang, adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Dapat dilihat pada peta berikut ini :

Gambar 1 Peta Administrasi Kota Padang Panjang



1.5 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini serta dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka tahapannya akan dibagi tiga bagian yaitu metoda pendekatan studi, metode pengumpulan data, metode analisis data.

1.5.1 Metode Pendekatan Studi

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang dijabarkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait di kota padang panjang. Adapun data berupa kebijakan, literatur terkait rumah tidak layak huni (RTLH). Data yang diambil adalah data yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik RTLH di kota padang panjang. Data yang digunakan sebagai berikut:

a. Bangunan

data ini mengetahui kondisi dan jumlah unit dari rumah tidak layak huni seperti :

1. Luas bangunan
2. Jenis lantai berdasarkan kondisinya
3. Jenis dinding beserta kondisi
4. Jenis atap beserta kondisinya
5. Ketersedian MCK
6. Sumber air bersih
7. Sumber listrik

data ini didapatkan dari dinas perumahan dan permukiman kota padang panjang

b. Status Kepemilikan Lahan

Data ini Digunakan Untuk Mengetahui status Kepemilikan Lahan yang Menerima Bantuan Rumah tidak layak huni sesuai dengan kriteria.

Tabel 1 Matriks Variabel Penelitian Dan Kebutuhan Data

Rumusan Masalah	Sasaran Penelitian	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis	Keluaran
Bagaimana Efektivitas Penanganan bantuan Rumah Tidak Layak Huni terhadap perumahan di Kota Padang Panjang	Mengidentifikasi prioritas penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan karakteristik rth di Kota Padang Panjang	1. Luas Bangunan	<7,2 m dan >7,2	Data Sekunder	Dokumen Rumah Tidak Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2018	Analisis pembobotan sederhana	Tingkat Prioritas Rumah Tidak Layak Huni Kota Padang Panjang
	2. Jenis Lantai	kayu, plesteran, ubin					
3. jenis dinding	bambu/kayu, asbes, tembok						
4. jenis atap	asbes, genteng, seng						
5. mck	MCK bersama, milik sendiri, tidak ada						
6. sumber penerangan	teraliri dan tidak teraliri						
7. sumber air	sumur, PDAM, air kemasan						
Menentukan prioritas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Padang Panjang	status kepemilikan	➤ milik pribadi	➤ bukan milik pribadi	Data Sekunder	Dokumen Rumah Tidak Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2018	Analisis Perbandingan	Arahan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan status kepemilikan Di Kota Padang Panjang
		Tingkat prioritas penanganan RTLH		➤ prioritas 1 ➤ prioritas 2 ➤ prioritas 3			

Sumber : Hasil Analisis 2022

1.5.3 Metode Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Penentuan Interval Kelas

Analisis pembobotan digunakan dalam bentuk penilain suatu hasil dari analisis yang disajikan dalam bentuk angka/bilangan, pembobotan dilakukan guna mencari nilai dari suatu potensi kawasan yang akan diteruskan dengan analisis pengelompokkan melalui beberapa kelas/hierarki yang digunakan tergantung beberapa kriteria yang digunakan dalam variabel. Dalam penelitian data dari karakteristik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Padang Panjang dengan menentukan interval kelas menggunakan metode dari Muta'ali (2014), untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

$$I_x = \frac{(c-b)}{k} \dots \dots \dots \text{Persamaan (1)}$$

Keterangan:

I_x = Interval Variabel

C = Nilai Minimum

B = Nilai Maksimum

K = Kelas yang ditentukan

b. Perhitungan Pembobotan Sederhana

Pembobotan sederhana dilakukan dengan cara menggunakan hierarki dari interval kelas yang digunakan seperti rendah, sedang dan tinggi tergantung banyaknya kriteria dalam variabel, Jika kriteria 2 maka menggunakan rendah dan tinggi dan sebagainya serta pada nilai yang tidak ada maka dibuat kosong. Dalam hal ini data yang digunakan adalah beberapa data variabel dengan kriteria yang dengan kondisi rendah atau buruk.

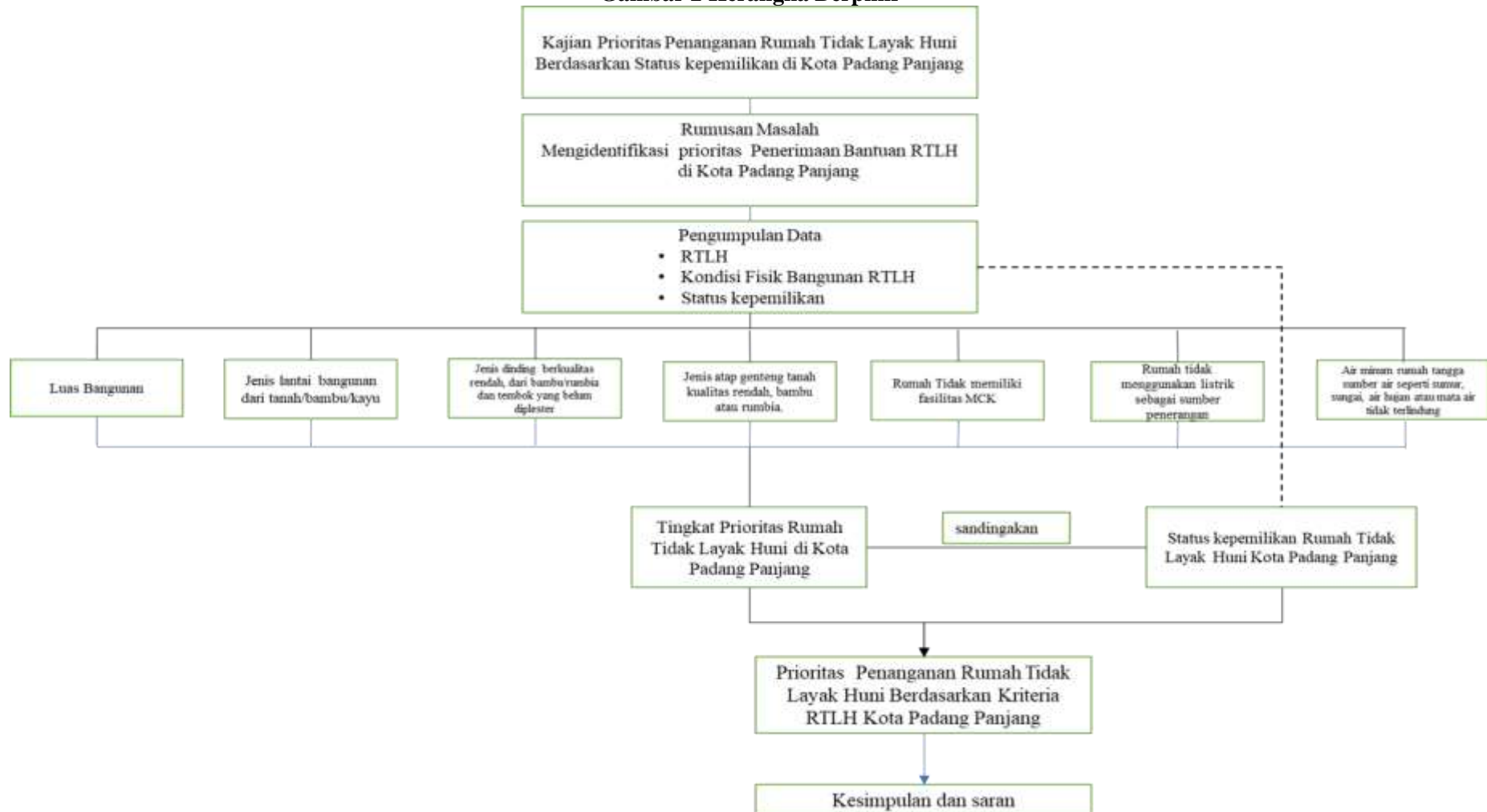
c. Analisis Matriks

Metode matriks adalah suatu metode untuk menganalisis struktur dengan menggunakan bantuan matriks,kekakuan metriks perpindahan dan metriks gaya (wahyuni, 2011). Ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan 2 hal yang berbeda atau lebih atau digunakan sebagai perbandingan dari beberapa faktor yang digunakan. Dalam hal ini digunakan faktor prioritas rumah tidak layak huni dan status kepemilikan untuk menentukan prioritas utama untuk bisa ditangani.

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk mempermudah memahami alur pengerjaan penelitian yang bisa dilihat pada diagram alur dibawah ini :

Gambar 2 Kerangka Berpikir



1.7 Sistematika Penulisan

Berdasarkan perumusan studi di atas, sistematika penulisan disajikan dalam urutan bab-bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, sasaran studi, ruang lingkup materi dan wilayah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini berisi tentang literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi dasar dalam menyusun studi ini.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang kondisi eksisting wilayah studi dan data-data yang berkaitan dengan studi ini.

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis yang digunakan untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana Kesesuaian Rumah Tidak Layak Huni dengan Kebijakan Tata Ruang di Kota Padang Panjang

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang temuan yang disimpulkan dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan.